

RINGKASAN

Sutina Early
NIM: 220510176

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Panggilan Umum Akibat Ketidakjelasan Surat Tercatat Dalam Sidang Perkara Perdata (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Lhoksukon).
(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum & Prof. Dr. Yulia, S.H., M.H)

Pemanggilan para pihak merupakan unsur fundamental dalam hukum acara perdata karena berkaitan dengan pemenuhan asas *audi et alteram partem*, yaitu bahwa setiap pihak berhak untuk didengar sebelum putusan dijatuhkan. Secara normatif, pemanggilan diatur dalam Pasal 390 HIR khususnya pada ayat (3) yang mengatur secara tegas bahwa panggilan umum dilakukan terhadap pihak yang alamatnya tidak diketahui. Pada penerapannya ketika surat tercatat yang digunakan sebagai sarana pemanggilan dikembalikan oleh PT Pos Indonesia dengan keterangan yang tidak jelas mengenai keberadaan pihak yang dipanggil, namun hakim tetap menetapkan melakukan panggilan umum sedangkan keterangan keberadaan pihak yang bersangkutan belum jelas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam menetapkan panggilan umum akibat ketidakjelasan surat tercatat, menilai ketepatan penerapan *diskresi* hakim ketika seluruh persyaratan putusan *verstek* telah terpenuhi, serta merumuskan solusi untuk mewujudkan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, ketua pengadilan, pengacara, dan akademisi, serta didukung oleh studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak menjadikan surat tercatat sebagai satu-satunya dasar pertimbangan, melainkan melakukan verifikasi terhadap berbagai fakta, penelusuran alamat, serta menempatkan panggilan umum sebagai *ultimum remedium*. Namun, hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon belum tepat dalam menerapkan *diskresi*-nya karena seluruh persyaratan untuk menjatuhkan putusan *verstek* sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) RBg telah terpenuhi. Dalam kondisi tersebut, hukum acara perdata telah menyediakan mekanisme penyelesaian perkara yang jelas sehingga penggunaan *diskresi* untuk melakukan panggilan umum berpotensi mengurangi kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batasan penggunaan *diskresi* hakim, pedoman teknis yang seragam, serta peningkatan standardisasi keterangan oleh PT Pos Indonesia guna menjamin konsistensi penerapan putusan *verstek* dan mewujudkan kepastian hukum

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Pemanggilan Umum, Surat Tercatat, Perkara Perdata.*

SUMMARY

Sutina Early
NIM: 220510176

Judicial Reasoning in Determining Public Summons Due to Unclear Registered Mail Information in Civil Proceedings (A Study at the Lhoksukon District Court).
(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum & Prof. Dr. Yulia, S.H., M.H)

The service of summons upon the parties constitutes a fundamental element of civil procedural law, as it is closely related to the fulfillment of the principle of audi et alteram partem, which guarantees every party the right to be heard before a judgment is rendered. Normatively, the service of summons is regulated under Article 390 of the Herzien Indonesisch Reglement (HIR), particularly paragraph (3), which expressly provides that a public summons may be issued against a party whose address is unknown. In practice, however, when a registered letter used as a means of serving the summons is returned by PT Pos Indonesia with an unclear indication concerning the whereabouts of the summoned party, the judge may nevertheless determine that a public summons should be issued, even though the whereabouts of the party concerned have not yet been clearly established.

This study aims to analyze the considerations of judges at the Lhoksukon District Court in ordering a public summons due to unclear registered mail information, assess the appropriateness of judicial discretion when all requirements for rendering a default judgment (verstek) have been fulfilled, and formulate legal solutions to ensure legal certainty.

This study employs an empirical legal research method with a juridical-empirical approach. Data were collected through interviews with judges, court clerks, the head of the court, lawyers, and academics, and supported by a literature review.

The results show that judges did not rely solely on registered mail, but also verified facts, traced addresses, and treated public summons as an ultimum remedium. However, the judges of the Lhoksukon District Court were not appropriate in exercising their discretion because all requirements for rendering a default judgment under Article 125 paragraph (1) HIR and Article 149 paragraph (1) RBg had been fulfilled. Therefore, clearer limitations on judicial discretion, uniform technical guidelines, and improved standardization by PT Pos Indonesia are necessary to ensure consistency in the application of default judgments and to strengthen legal certainty..

Keywords: Judge's Considerations, Public Summon , Registered Mail, Civil Case.